

Indeks Pembangunan Manusia Ilmu Pengetahuan

Yeni Yulianti^{1*}, Siti Qomariah²

^{1,2}Institut Madani Nusantara Indonesia, Indonesia

E-mail: yenyulianti0305@gmail.com¹, stqomariah36@gmail.com²

Alamat: Jl. Lio Balandongan 74 Citamiang kota Sukabumi

*Korespondensi penulis: yenyulianti0305@gmail.com

Abstract. *The Human Development Index (HDI) is a critical indicator that measures the quality of development in a region through health, education, and economic dimensions. This study aims to analyze the key factors influencing HDI and its impact on social development in Indonesia. Using a descriptive analysis approach, secondary data from Statistics Indonesia (BPS) were utilized to evaluate HDI trends and disparities in recent years. Findings indicate that HDI improvement directly impacts community welfare, strengthens social stability, and reduces economic inequality. However, challenges such as regional disparities and unequal access to basic services must be addressed to achieve sustainable development. The implications of this study are expected to serve as a reference for policymakers in designing more inclusive development strategies.*

Keywords: *Education, Economy, HDI, Health, Social Development.*

Abstrak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang mengukur kualitas pembangunan suatu wilayah melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi IPM serta dampaknya terhadap pembangunan sosial di Indonesia. Dengan pendekatan analisis deskriptif, data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) digunakan untuk mengevaluasi tren dan disparitas IPM dalam beberapa tahun terakhir. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan IPM berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, memperkuat stabilitas sosial, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun, tantangan seperti disparitas regional dan ketimpangan akses layanan dasar masih perlu diatasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif.

Kata kunci: Ekonomi, IPM, Kesehatan, Pembangunan Sosial, Pendidikan.

1. LATAR BELAKANG

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah representasi menyeluruh tentang tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah, yang mencerminkan hasil dari berbagai upaya pembangunan di wilayah tersebut. Perubahan angka IPM menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan dalam kinerja pembangunan manusia di daerah tersebut. Dalam konteks pembangunan manusia, upaya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui beberapa aspek utama, yaitu: Aspek Fisik: Meningkatkan kesehatan masyarakat, Aspek Intelektual: Meningkatkan kualitas pendidikan, Aspek Kesejahteraan Ekonomi: Memperkuat daya beli masyarakat, dan spek Moralitas: Mengembangkan keimanan dan ketakwaan (Bappeda, 2017).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2023 mencapai 74,39, mengalami peningkatan sebesar 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 73,77. Peningkatan ini terjadi pada semua dimensi yang diukur oleh IPM. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, angka harapan hidup saat lahir meningkat dari 73,7 tahun pada tahun 2020 menjadi 73,93 tahun pada tahun 2023. Sementara itu, pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah juga menunjukkan kenaikan, dari 12,6 tahun pada tahun 2020 menjadi 12,8 tahun pada tahun 2023. Selain itu, pada dimensi standar hidup layak, pengeluaran per kapita per tahun mengalami peningkatan dari Rp11.293.000 pada tahun 2020 menjadi Rp11.899.000 pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan.

Kemajuan dalam IPM ini mencerminkan perkembangan positif dalam pembangunan manusia di Indonesia. Namun, beberapa tantangan masih harus diatasi, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial (Ummah, 2024).

Indonesia sendiri, sebagai negara berkembang, masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan IPM. Meskipun mengalami kemajuan di beberapa sektor, masih terdapat disparitas pembangunan antara wilayah, seperti perbedaan signifikan antara kawasan perkotaan dan pedesaan serta antara wilayah barat dan timur Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai pihak perlu bekerja sama untuk meningkatkan dimensi-dimensi pembangunan yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan ekonomi agar tercapai pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak negara telah mampu meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pendapatan melalui berbagai inovasi. Misalnya, perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi medis memungkinkan peningkatan harapan hidup dan kualitas kesehatan masyarakat. Sementara itu, kemajuan dalam bidang pendidikan, seperti akses terhadap informasi dan teknologi digital, berperan besar dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk menggali bagaimana ilmu pengetahuan secara langsung mempengaruhi peningkatan IPM dan apa saja faktor-faktor yang berkontribusi dalam peningkatan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Defenisi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah sebuah ukuran komposit yang dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990. Indeks ini dirancang untuk mengukur tingkat pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Berbeda dengan indikator ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, IPM memberikan gambaran yang lebih luas dan komprehensif tentang kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan multidimensional.

Menurut (UNDP, 2020), pembangunan manusia harus dilihat tidak hanya dari aspek material, tetapi juga melalui perspektif kesejahteraan sosial, kualitas pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, IPM mencerminkan kualitas hidup yang dapat dinikmati oleh masyarakat, bukan sekadar kekayaan ekonomi suatu negara (Wulandari & Fadilah, 2022).

Tiga Dimensi Utama Dalam Indeks Pembangunan Manusia

1) Kesehatan

Kesehatan diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, yang mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat serta akses terhadap layanan kesehatan dasar. Angka ini mencerminkan risiko kesehatan dan tingkat ketersediaan layanan seperti nutrisi, sanitasi, dan fasilitas kesehatan (UNDP, 2020).

2) Pendidikan

Dimensi pendidikan mencakup rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). RLS menggambarkan jumlah tahun pendidikan yang ditempuh oleh penduduk dewasa, sedangkan HLS mengukur potensi pendidikan anak-anak usia sekolah. Menurut Amartya Sen, pendidikan memainkan peran utama dalam memberdayakan masyarakat, memungkinkan individu menjadi lebih mandiri, produktif, dan mampu mengembangkan potensi diri.

3) Standar Hidup Layak

Standar hidup diukur melalui pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (Purchasing Power Parity, PPP). Pendapatan ini mencerminkan daya beli masyarakat dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, papan, dan sandang. Menurut (*World Development Indicators*, 2018), pendapatan per kapita memiliki hubungan langsung dengan

kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.

Fungsi dan Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

IPM tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur statistik, tetapi juga sebagai alat pembanding pembangunan antar negara dan wilayah. (Todaro & Smith, 2012) menyebutkan bahwa IPM dapat digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya. Dengan IPM, pembuat kebijakan dapat:

- 1) Mengidentifikasi sektor-sektor prioritas pembangunan seperti kesehatan, pendidikan, atau ekonomi.
- 2) Mengevaluasi efektivitas program-program pembangunan yang telah dijalankan.
- 3) Membandingkan kesejahteraan antar wilayah secara objektif, memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih adil dan merata.

Meski IPM dianggap sebagai ukuran yang komprehensif, beberapa kritikus menyoroti adanya keterbatasan. Beberapa aspek penting seperti kebebasan politik, ketimpangan sosial, dan hak asasi manusia tidak tercakup dalam IPM. Selain itu, fokus pada rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pendidikan yang sebenarnya (Herdiansyah & Sukaesih, 2020).

Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

1) Kesehatan

Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, yang dipengaruhi oleh akses fasilitas kesehatan, program layanan preventif dan kuratif, serta kualitas gizi dan sanitasi. WHO menyebutkan bahwa investasi besar di sektor kesehatan meningkatkan angka harapan hidup dan IPM (*World Health Report*, 2020).

2) Pendidikan

Pendidikan mencakup rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Faktor utama yang memengaruhi adalah ketersediaan fasilitas pendidikan, kualitas pengajaran, dan kebijakan pendidikan. UNESCO menegaskan bahwa pendidikan dasar dan menengah sangat efektif dalam meningkatkan IPM (*UNESCO*, 2019).

3) Ekonomi

Standar hidup diukur melalui Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita, yang terkait erat dengan pendapatan masyarakat, ketersediaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang merata (*World Bank*, 2021).

4) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang mendukung alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan serta program pemerataan ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatkan IPM. Stabilitas politik juga berkontribusi pada pembangunan manusia.

5) Teknologi

Inovasi teknologi meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, serta efisiensi ekonomi. Teknologi digital seperti pembelajaran daring dan telemedicine memperluas jangkauan layanan dasar, terutama di wilayah terpencil (*OECD Science, Technology and Innovation Outlook*, 2020).

Dampak Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pembangunan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan sosial, yang mencerminkan sejauh mana kualitas hidup masyarakat dapat dipenuhi dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. IPM yang tinggi menunjukkan peningkatan kualitas hidup, sedangkan IPM yang rendah mencerminkan tantangan dalam akses layanan dasar.

1) Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Sosial

IPM yang tinggi memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Hal ini menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, stabil secara sosial, dan minim konflik karena distribusi kebutuhan yang lebih merata.

2) Perbaikan Akses dan Kualitas Pendidikan

Akses pendidikan yang lebih baik meningkatkan daya saing individu dan kesadaran sosial. Pendidikan berkualitas mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sosial, sebagaimana terlihat di negara-negara seperti Finlandia dan Jepang yang memiliki sistem pendidikan unggul.

3) Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Harapan Hidup

Dengan layanan kesehatan yang baik, masyarakat lebih sehat dan produktif, serta harapan hidup meningkat. Contohnya, negara seperti Kanada dan Jerman menunjukkan kesehatan masyarakat yang baik berkontribusi pada aktivitas sosial dan ekonomi yang lebih tinggi.

4) Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

IPM yang tinggi berperan dalam menurunkan ketimpangan dengan memastikan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Negara seperti

Belanda dan Swedia menunjukkan bahwa pemerataan ini mengurangi kecemburuan sosial dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

5) Mendorong Partisipasi Sosial

Dengan IPM yang tinggi, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Hal ini memperkuat ikatan antarwarga, mengurangi isolasi sosial, dan menciptakan masyarakat yang inklusif, seperti yang terlihat di Kanada dan Australia.

6) Meningkatkan Stabilitas dan Keamanan Sosial

IPM yang tinggi sering kali berkorelasi dengan rendahnya tingkat kriminalitas dan konflik sosial. Negara-negara maju menunjukkan bahwa stabilitas sosial yang baik memungkinkan masyarakat fokus pada pembangunan yang berkelanjutan.

7) Memperkuat Kesadaran Lingkungan

Kesadaran lingkungan meningkat seiring dengan IPM yang tinggi, didorong oleh pendidikan yang baik dan kesejahteraan yang stabil. Di negara seperti Norwegia dan Swiss, masyarakat aktif menjaga lingkungan melalui program daur ulang dan penggunaan energi terbarukan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan pola, tren, dan disparitas IPM berdasarkan data sekunder yang diambil dari sumber terpercaya. Data utama diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan UNDP. Data dari BPS mencakup indikator IPM seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), dan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita selama lima tahun terakhir (2019–2023). Sementara itu, laporan UNDP memberikan informasi global terkait metodologi penghitungan IPM dan data pembandingan yang relevan untuk mengevaluasi kondisi pembangunan manusia di Indonesia.

Dalam penelitian ini, variabel yang dianalisis mencakup tiga dimensi utama IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, yang mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat. Dimensi pendidikan dianalisis melalui dua indikator utama, yakni rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dimensi standar hidup dianalisis berdasarkan pendapatan per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP).

Proses analisis data dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data dari sumber-sumber yang disebutkan. Data disusun secara kronologis untuk mengevaluasi perubahan tren IPM selama lima tahun terakhir. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola peningkatan atau penurunan IPM secara nasional serta mengevaluasi disparitas antarwilayah, khususnya antara wilayah barat (seperti Jawa dan Sumatra) dan wilayah timur (seperti Papua dan Maluku). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tren IPM di Indonesia, memahami faktor-faktor yang memengaruhi disparitas regional, serta memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk mendorong pembangunan manusia yang lebih merata dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan deskriptif dan analisis data sekunder yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi kondisi pembangunan manusia di Indonesia sekaligus menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan yang efektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Peningkatan IPM di Indonesia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 ke 2023, dengan angka IPM yang meningkat dari 73,77 pada tahun 2022 menjadi 74,39 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan manusia yang lebih baik.

Secara umum, peningkatan IPM dipengaruhi oleh tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

- 1) Kesehatan: Peningkatan harapan hidup di Indonesia menjadi salah satu faktor utama dalam kenaikan IPM ini. Angka harapan hidup yang meningkat dari 73,7 tahun pada tahun 2022 menjadi 73,93 tahun pada tahun 2023 menunjukkan perbaikan dalam kualitas layanan kesehatan dan upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan kesehatan masyarakat. Program-program kesehatan preventif, peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta upaya vaksinasi dan penanganan penyakit menular telah berkontribusi pada peningkatan harapan hidup masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, tantangan dalam mengatasi penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan kanker masih perlu perhatian lebih lanjut untuk memastikan kualitas hidup yang lebih baik di seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Pendidikan: Peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) dari 8,2 tahun pada 2022 menjadi 8,4 tahun pada 2023 juga berperan penting dalam peningkatan IPM. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin merata, meskipun masih ada

tantangan di beberapa daerah yang memiliki tingkat putus sekolah yang tinggi, terutama di daerah pedesaan dan wilayah timur Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berupaya keras dalam memperbaiki kualitas pendidikan melalui program pengembangan guru, peningkatan sarana prasarana pendidikan, serta penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi. Namun, untuk mencapai pemerataan kualitas pendidikan, perhatian khusus perlu diberikan pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.

- 3) **Ekonomi:** Dari sisi ekonomi, pendapatan per kapita Indonesia mengalami peningkatan sebesar 5,3%, yang mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Peningkatan ini diindikasikan oleh adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, yang ditandai dengan kembali pulihnya sektor-sektor produktif seperti industri, perdagangan, dan pariwisata. Meskipun demikian, tantangan utama yang harus dihadapi adalah kesenjangan ekonomi antara wilayah yang berkembang pesat dan wilayah yang tertinggal. Peningkatan produktivitas dan distribusi pendapatan yang lebih merata menjadi kunci untuk memastikan bahwa peningkatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Disparitas Regional dalam IPM

Meskipun secara keseluruhan IPM Indonesia menunjukkan tren positif, analisis menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Pulau Jawa, sebagai wilayah yang paling maju dan berkembang, memiliki IPM rata-rata 76,2, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Papua yang hanya mencapai 60,8. Perbedaan ini menggambarkan adanya disparitas yang cukup besar dalam hal pembangunan manusia antar wilayah di Indonesia.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan disparitas ini antara lain adalah:

- 1) **Akses Terbatas ke Pendidikan:** Di wilayah timur Indonesia, akses terhadap pendidikan berkualitas masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, serta ketimpangan dalam pembiayaan pendidikan menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Di sisi lain, di wilayah barat Indonesia, terutama di Pulau Jawa, fasilitas pendidikan lebih lengkap dan kualitas pengajar lebih tinggi, sehingga mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah.
- 2) **Fasilitas Kesehatan yang Terbatas:** Akses terhadap fasilitas kesehatan juga menjadi masalah besar di wilayah timur. Meskipun telah ada program kesehatan dari pemerintah, namun distribusi fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan obat-obatan di

daerah-daerah terpencil masih sangat terbatas. Hal ini berkontribusi pada rendahnya harapan hidup dan kualitas kesehatan di wilayah tersebut. Sementara itu, di wilayah barat Indonesia, infrastruktur kesehatan relatif lebih baik dan lebih mudah diakses oleh masyarakat.

- 3) **Infrastruktur Ekonomi yang Tidak Merata:** Salah satu tantangan besar lainnya adalah ketidakmerataan infrastruktur ekonomi. Daerah-daerah di timur Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam hal transportasi, jaringan komunikasi, dan akses terhadap pasar. Hal ini membatasi potensi ekonomi dan menyulitkan masyarakat di daerah tersebut untuk mengakses peluang kerja dan sumber daya ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Sebaliknya, di wilayah barat, terutama di Pulau Jawa, infrastruktur lebih maju, yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat.

Implikasi Terhadap Pembangunan Sosial

Peningkatan IPM memiliki dampak langsung terhadap pembangunan sosial di Indonesia. IPM yang tinggi biasanya diiringi dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Di daerah dengan IPM tinggi, seperti DKI Jakarta, terdapat partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Hal ini tercermin dalam adanya peningkatan kesadaran sosial, gotong royong, dan partisipasi aktif dalam pembangunan lingkungan dan sosial-ekonomi.

Namun, daerah-daerah dengan IPM rendah, seperti Papua, masih menghadapi berbagai tantangan sosial yang lebih berat. Di daerah tersebut, tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial yang lebih tinggi dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. Masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar daripada keterlibatan dalam aktivitas sosial dan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan yang dapat mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi antar daerah agar pembangunan sosial dapat berjalan lebih merata di seluruh Indonesia.

Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penyebab disparitas IPM antar daerah, seperti keterbatasan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta, diharapkan ketimpangan ini dapat teratasi, sehingga pembangunan sosial yang inklusif dan merata dapat terwujud di seluruh penjuru Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas pembangunan sosial di Indonesia. Faktor utama yang memengaruhi IPM meliputi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang saling terkait dan saling mendukung. Peningkatan dalam ketiga aspek tersebut terbukti dapat mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat. Meskipun demikian, disparitas regional masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi untuk memastikan pemerataan pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia, khususnya antara wilayah barat dan timur yang memiliki perbedaan signifikan dalam hal IPM.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis guna mengurangi ketimpangan tersebut. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah dengan IPM rendah agar dapat memperbaiki akses dan kualitas layanan di wilayah tersebut. Selain itu, program pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil, harus menjadi prioritas guna memperlancar distribusi sumber daya dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk mempercepat peningkatan IPM secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan sosial yang lebih inklusif dapat tercapai, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara lebih merata dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Bappeda, T. K., & J. (2017). *Indeks pembangunan manusia*.
- Herdiansyah, D., & Sukaesih, P. K. (2020). Pembangunan sektor pendidikan sebagai penunjang indeks pembangunan manusia di Kota Bandung. *Agregasi: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1), 43–50. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.2765>
- OECD. (2020). *Science, Technology and Innovation Outlook 2020*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development* (11th ed.). Pearson Education.
- Ummah, S. (2024). Analisis deskriptif indeks pembangunan manusia Indonesia periode. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 4(1), 41–53.
- UNESCO. (2019). *Global education monitoring report 2019: Migration, displacement and education – Building bridges, not walls*.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Human Development Report 2020: The next frontier: Human development and the Anthropocene*.

World Bank. (2018). *World development indicators 2018*.

World Bank. (2021). *World development report 2021: Data for better lives*.

World Health Organization (WHO). (2020). *World health report 2020: Health systems financing – The path to universal coverage*.

Wulandari, R., & Fadilah. (2022). Analisis pengaruh indeks kesehatan dan indeks pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia. *Jurnal Sosial dan Ekonomi Pembangunan*, 10(3), 241–247.